

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah kemiskinan bukanlah masalah yang baru. Sejak bangsa Indonesia merdeka, menjadi cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat. Kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian rakyat Indonesia. Hampir setiap pimpinan di Indonesia, selalu menghadapi kenyataan ini, meskipun bentuk kemiskinan yang terjadi tidak sama di setiap era suatu pemerintahan. Hari kelahiran koperasi diperingati setiap tanggal 12 Juli, dan pada tanggal 12 Juli 2010 usia badan koperasi Indonesia menginjak usia yang ke 63. Namun diusianya yang sudah cukup dewasa tersebut, keberadaan koperasi belum mampu megentaskan kemiskinan.

Di Indonesia koperasi berperan sebagai bagian dari pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Peran tersebut membuat beban koperasi Indonesia jauh lebih berat dengan koperasi-koperasi di negara lain, karena koperasi Indonesia mengemban misi kesejahteraan suatu negara, bukan hanya menjadi bentuk suatu badan usaha swasta. Kedua, koperasi mempunyai peran agar jiwa dan semangatnya juga berkembang di perusahaan swasta dan negara.

Perbedaan peran koperasi Indonesia dan di negara lain terjadi karena koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan struktural yang saat ini semakin diperparah dengan berlakunya pasar bebas. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dan soko guru ekonomi nasional kian hari semakin pudar peran dan tugasnya dalam perekonomian Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat UUD 1945. Pudarnya peran dan fungsi koperasi sebagai benteng pembangunan ekonomi rakyat saat disebabkan koperasi mengalami krisis ideologi, krisis identitas, dan krisis misioner yang menyebabkan koperasi mengalami keterpurukan dan tidak mampu lagi sebagai media yang secara strategis untuk menghimpun kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil.

Koperasi saat ini telah dimasuki ideologi kapitalisme yang telah mereduksi watak sosial koperasi. Koperasi bukan lagi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan bersama, tetapi telah menjadi lembaga ekonomi yang berorientasi bisnis murni dan laba sehingga koperasi saat ini telah ditransformasi menjadi koperasi kapitalistik yang tidak lagi mengenal watak aslinya yaitu mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya. Ibaratnya koperasi saat ini telah menjadi PT yang bernama koperasi, yang lebih mengutamakan kepentingan para pemodal daripada kepentingan dan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi dalam wujud nyatanya sekarang telah menjadi suatu bidang usaha yang sangat menguntungkan bagi para pemilik modal. Menjamurnya

koperasi saat ini utamanya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam menjadi indikasi kuat betapa koperasi telah menjadi koperasi kapitalistik. Kenyataan di lapangan banyak lembaga keuangan mikro yang “berbaju” koperasi yang sejatinya tujuan dan misinya bukan untuk membantu meringankan beban dan mensejahterakan anggotanya tetapi lebih untuk mensejahterakan para pemodal yang mensponsori berdirinya koperasi tersebut. Akibatnya semakin banyaknya koperasi yang berdiri saat ini tidak berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat dan tidak mampu menurunkan kemiskinan di Indonesia, karena manfaat koperasi saat ini lebih banyak dirasakan oleh para pemodal daripada anggotanya.

Menurut penulis, kondisi koperasi yang terjadi saat ini telah lama diprediksikan oleh para ekonom gerakan ekonomi rakyat sejak diberlakukan Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992. Undang-undang tersebut menjadi salah satu legitimasi untuk membentuk koperasi kapitalistik seperti saat ini. Undang-undang tersebut telah menjadi alat bagi para pemodal untuk meraih keuntungan bisnis dengan memakai “baju” koperasi. Undang-undang koperasi tersebut telah memasukan koperasi dalam wilayah abu-abu (*gray area*) dalam dunia bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pemodal untuk mengambil celah (*loop hole*) atas status koperasi.

Berdasarkan UUD 1945 koperasi menjadi alat politik negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga menjadi kewajiban negara untuk memberikan “fasilitas” kepada koperasi. Fasilitas (*preferensi*) tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal untuk meraih keuntungan dengan

mengeliminir kepentingan dan kesejahteraan anggota koperasi karena koperasi telah menjadi badan usaha yang berorientasi bisnis murni bukan badan usaha yang berwatak sosial. Koperasi berdasarkan watak dan ideologinya, sejatinya merupakan media yang sangat strategis bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia yang semakin tinggi. Salah satu faktor penyebab orang menjadi miskin adalah karena tidak memiliki aset produktif yang dapat digunakan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan anggotanya tetapi juga harus mampu meningkatkan kepemilikan aset produktif bagi anggotanya.

Koperasi dapat menjadi sarana efektif bagi negara untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dalam penguasaan aset ekonomi dalam masyarakat. Koperasi dapat berfungsi sebagai alat untuk pemeratakan struktur konsentrasi penguasaan aset ekonomi sehingga para ekonomi lemah (orang miskin) dapat memiliki kesempatan untuk menguasai aset produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonominya.

Koperasi akan menjadi sarana efektif bagi pemerintah untuk mengentaskan penduduk miskin di Indonesia jika dilakukan revitalisasi koperasi secara sinergis dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Langkah awal dalam revitalisasi koperasi saat ini adalah dengan melakukan reformasi atas Undang-Undang Koperasi dan aturan-aturan hukum yang memayungi keoperasi untuk mengembalikan koperasi pada watak dan ideologi aslinya.

Undang-Undang Koperasi saat ini telah menyebabkan koperasi tidak memiliki peran strategis dalam kemandirian ekonomi rakyat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia karena cenderung mendorong koperasi untuk masuk dalam liberalisme pasar yang banyak dikuasai oleh para pemodal kuat. Langkah kedua adalah mendorong munculnya koperasi berbasis komunitas dengan daya dukung pemerintah untuk melakukan restrukturisasi ekonomi dalam pemilikan dan penguasaan aset ekonomi. Koperasi merupakan media yang menghimpun secara sinergis kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat yang lemah dan kecil untuk dapat menguasai aset produktif secara kolektif. Koperasi berbasis komunitas akan dapat membangun kesejahteraan secara berjamaah (kolektif) dan memunculkan semangat gotong royong sebagai ruh dari ekonomi kerakyatan. Hal tersebut memerlukan daya dukung pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat menjadikan koperasi dapat eksis dalam melaksanakan perannya dan juga tidak menjadikan koperasi hanya sebagai alat politik negara semata.

Langkah berikutnya adalah reformasi dalam manajemen pengelolaan koperasi. Salah satu faktor terbesar terpuruknya koperasi di Indonesia adalah akibat salah urus dan salah pengelolaan. Hal tersebut disebabkan adanya krisis kepemimpinan dalam koperasi, oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah untuk mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta untuk mencetak dan mendidik sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan dalam bidang koperasi, termasuk

melakukan revisi atas kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi dalam pemberian materi tentang perkoperasian.

Revitalisasi dan reformasi koperasi di Indonesia akan menjadi salah satu upaya strategis bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Koperasi merupakan media strategis untuk memberikan kesempatan kepada para ekonomi lemah (orang miskin) untuk menguasai aset produktif agar dapat menjadikan mereka lebih mandiri dalam bidang ekonomi. Sehingga revitalisasi dan reformasi koperasi di Indonesia harus diarahkan dan disinergikan dengan program dan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan langkah penting revitalisasi dan reformasi koperasi saat ini adalah mengembalikan koperasi kepada watak dan ideologi sejatinya yaitu berwatak sosial dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anggotanya.

Pada tahun 2008 Badan Pusat Statistik mengungkapkan 17,2 persen (37,4 juta) Penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah mereka yang hidup sedikit di atas angka ini lebih banyak. Salah satu solusi mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan koperasi. Koperasi juga tahan terhadap krisis ekonomi nasional sebab tak bergantung pinjaman, impor, apalagi dollar. Agar koperasi mampu mengatasi kemiskinan, pemerintah harus membebaskannya bergerak leluasa dalam aneka sektor tanpa diboncengi kepentingan politik.

Dalam artikel *Co-operatives as a Global Movement*, Direktur *International Cooperative Alliance* (ICA) Bruce Thodharson mengkritik

berbagai jenis koperasi yang tidak berkembang karena meninggalkan jatinya, bahkan mengancam intervensi pihak luar. Guna memacu pengembangan koperasi, berbagai penelitian dan pelatihan koperasi harus segera digerakkan guna mengembalikan jati diri koperasi dan bebas dari campur tangan dan aneka kepentingan politik.

Memberdayakan koperasi untuk mengikis kemiskinan terkait penertiban koperasi. Saat ini gejala perkembangan koperasi menunjukkan tidak sehat. Akibatnya, pengembangannya tidak optimal, tak sesuai jati dirinya. Di Indonesia terjadi polarisasi jenis koperasi (minimal ada 37 jenis). Padahal, dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian, pasal (16) menggariskan hanya ada empat jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Polarisasi jenis koperasi ini menyebabkan proses pembinaannya lebih sulit karena masing-masing jenis memiliki karakteristik jenis usaha berbeda. Koperasi-koperasi yang telah menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan perlu belajar pada koperasi yang sudah maju. Koperasi Jembatan Kesejahteraan misalnya, berkembang saat krisis melalui jaringan ritel skala mikro, ditopang akses kredit mikro dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI), dengan omzet ratusan miliar rupiah.

Tingginya omzet bukan menjadi perhatian, tetapi yang lebih penting pendayagunaan TI dalam proses karena mampu meningkatkan kapasitas bisnis sehingga kompetitif dalam merebut pasar. Koperasi semacam ini memiliki daya saing dalam memasuki pasar bebas dengan mengedepankan keunggulan

kompetitif dibanding keunggulan komparatif. Program Aksi Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, termasuk koperasi, berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha ekonomi sektor informal berskala mikro. Terutama yang berstatus keluarga miskin dalam rangka mendapat penghasilan tetap melalui peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha mandiri, berkelanjutan, siap tumbuh, dan berdaya saing. Hal ini harus didukung program dari lembaga penyedia jasa pengembangan usaha yang berkualitas guna meningkatkan akses koperasi atas pasar dan sumber daya produktif.

Pemberdayaan koperasi amat relevan bagi pengentasan kemiskinan karena segala aktivitasnya bernapaskan kekeluargaan. Implikasinya, kerja sama antaranggota harus menjadi salah satu prinsip koperasi. Kerja sama di sini bukan hanya didasari pengertian, pemilik koperasi sekaligus pelanggan, tetapi juga harus memberi layanan kepada anggota seefektif mungkin. Maka, kerja sama harus diberdayakan. Pemberdayaan harus dimulai dengan meningkatkan mutu SDM guna menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian di antara anggota.

Sikap keswadayaan dan kemandirian harus dikoordinasi koperasi guna meredam konkurensi yang bisa timbul antaranggota sehingga secara bertahap dapat diubah menjadi jalinan kerja sama, saling membantu, dan mendukung di antara mereka. Kekuatan koperasi justru pada eratnya kerja sama di antara anggota sekaligus sebagai senjata ampuh menghadapi ulah tengkulak dan kapitalis. Kerja sama dapat ditingkatkan menjadi kemitraan di antara aneka koperasi yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga antarnegara. Kemitraan

ini berpotensi meningkatkan daya saing guna mencapai skala usaha yang kian ekonomis. Prinsip kerja sama dalam koperasi mengandung substansi, kerja sama ini didasarkan rasa solidaritas bersama demi kemajuan gerakan koperasi. Jadi, eksistensi koperasi memiliki peran strategis dalam mengikis kemiskinan, bahkan kemajuan koperasi harus dirasakan masyarakat sekitarnya. Koperasi terus dituntut memberi manfaat besar, mengingat misi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota. Di sisi lain, koperasi merupakan wujud asosiasi masyarakat yang menjadi anggotanya. Maka sudah sepantasnya segenap pengurus koperasi memiliki rasa tanggung jawab moral maupun sosial untuk memperbaiki taraf hidup ekonomi masyarakat sekelilingnya. Bila masyarakat Indonesia berjiwa koperasi dan koperasi yang dijalankan sesuai prinsip itu, hal ini memberi kontribusi besar bagi pengurangan jumlah keluarga miskin secara signifikan, sekaligus membantu mengatasi masalah pengangguran yang hingga kini terus membengkak.

Pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di segala bidang tidak lepas dari peran serta masyarakat, hasil dari pembangunan khususnya disektor perekonomian harus dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk melakukan pemerataan dan hasil-hasil pembangunan, pemerintah harus dapat bersikap adil terhadap daerah-daerah, agar pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada satu daerahpun yang tidak menikmati hasil pembangunan dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia adalah

pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sesuai dengan tingkat hidup kebutuhan serta adanya hasil-hasil pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi lebih diarahkan pada terwujudnya demokrasi ekonomi dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah lebih diarahkan pada terwujudnya demokrasi ekonomi dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri demokrasi adalah bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Maka bentuk usaha yang sesuai adalah koperasi, sebab didalam koperasi kepentingan dan kebutuhan anggota lebih diutamakan dan sasaran serta pembinaannya adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Dalam UUD 1945 pasal 33, disini tidak berarti bahwa seluruh ekonomi harus dikoperasi, tetapi koperasi adalah wahana social ekonomi utama di daerah pedesaan dan perdagangan koperasi yang didorong pembangunannya oleh pemerintah adalah koperasi yang berlandaskan atas swadaya masyarakat sendiri, sukarela, kepentingannya bersama serta bergerak atas inisiatif ekonomi. Kedudukan koperasi dalam UUD 1945 pasal 33 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

- b. Cabang-cabang yang penting bagi dan Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mendorong gerakan koperasi sebagai wadah yang membantu golongan ekonomi lemah yaitu dengan dibentuk koperasi. Koperasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan dengan segala potensi ekonominya. Koperasi sekarang ini menjadi program yang perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi maupun tujuannya. Dengan demikian, keberadaan koperasi di setiap wilayah kecamatan mempunyai arti yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi di berbagai sektor, maka koperasi diberi ruang gerak usaha yang seluasluasnya untuk lebih memantapkan kemampuan dan peranannya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di pedesaan.

Pedagang merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana telah diketahui setiap usaha atau kegiatan akan membutuhkan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan. Namun, modal tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi sendiri. Bahkan, masalah modal menjadi problem bagi mereka, lebih-lebih bagi para pedagang. Mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sebagian besar dari

pedagang tersebut berusaha untuk mengatasi permasalahan permodalan dengan mencari pinjaman kepada para lintah darat atau rentenir, dengan harapan akan membantu mengatasi permasalahan mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan, justru kesulitanlah yang mereka dapatkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya bunga yang dibebankan kepada mereka.

Koperasi Artha Manunggal merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Namun berdasarkan pengamatan penulis Jatidiri koperasi “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” mulai digugat oleh lingkungan global. Apakah masih relevan jatidiri seperti itu dipertahankan di alam perdagangan bebas ? Kelihatannya memang terlalu kaku. Padahal manajemen modern selalu berpesan pada manajernya agar terus berimprovisasi, fleksibel, dan terbuka terhadap setiap perubahan. Seiring dengan hal itu, pantas juga dipertanyakan kembali apakah tidak lebih akomodatif bila jatidiri Koperasi tersebut digeser menjadi "dari anggota dan bukan anggota, oleh anggota dan bukan anggota untuk anggota". Dalam hal ini ada tuntutan perubahan paradigma koperasi. Jadi yang tidak berubah adalah tujuan akhir dari koperasi itu sendiri yaitu "untuk kepentingan ekonomi anggota".

Bila pergeseran jatidtri koperasi ini dapat diterima oleh para koperasiawan, maka paradigma baru ini akan membawa konsekuensi internal yang mendasar bagi manajemen koperasi. Demikian pula pengertian koperasi itu sendiri yang telah tertancap dalam UU Perkoperasian No.25/1992 dan PP

No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam juga harus mengalami perubahan. Memang pasti banyak yang menggerutu akibat perubahan ini. Tetapi bukankah hanya melalui perubahan itu sendiri yang dapat membawa perbaikan? Kata orang bijak, "if you don't change you die". Artinya, bila kita tidak mengikuti perubahan itu sendiri maka kita tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang.

Tak terkecuali koperasi Artha Manunggal Surakarta. Koperasipun harus ikut berubah bilamana ingin maju dan berkembang. Sejarah koperasi Indonesia sudah mencatat bahwa maju berkembangnya koperasi diawali dengan berkualitas tidaknya proses simpan-pinjam di koperasi tersebut. Ingat bukan “pinjam -simpan”. Dengan demikian, bukankah sebaiknya kita mulai membenahi koperasi ini dengan menata ulang secara mendasar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ataupun koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) ?

Bertitik tolak dari pandangan (*point of view*) yang demikian, maka sangat wajar harus didukung penuh kebijakan Menteri Koperasi dan UKM Alimarwan Hanan yang saat ini sedang bergelut dan berupaya untuk merevitalisasi KSP ataupun USP. Adanya rencana kebijakan merevitalisasi 150 KSP dengan suntikan modal sebesar Rp. 1 milyar per KSP pada program tahun 2004 harus dioptimalkan, sehingga sejak dini perlu dicermati secara hati-hati. Peristiwa dilahirkannya koperasi-koperasi demi “suksesnya” penyaluran KUT kiranya dapat dijadikan suatu kontemplasi yang hasil

akhirnya ternyata kurang menggembirakan bagi pertumbuhan koperasi itu sendiri.

Oleh sebab itu, paradigma revitalisasi KSP dan atau USP harus dipandang dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional secara bersama. Disini peran KSP/USP sangat strategis terutama untuk melayani permodalan ataupun menampung simpanan/deposito para Usaha Kecil (lihat gambar Domain Segmen Pelayanan KSP/USP). Konsekuensinya, apayang dikatakan oleh Prof.Dr.Jochen Ropke, dalam bukunya “*The Economic Theory of Cooperatives*” dari Philipps University Marburg Germany, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas. Dikatakan, dalam menggunakan definisi koperasi harus hati-hatidan jangan terlalu banyak mengambil pengertian dari definisi koperasi yang berdasarkan pada kriteria identitas (*owners = customers = users*).

Jadi paradigma pemberdayaan KSP/USP kedepan harus menetapkan segmen pelayanannya. Tulisan ini menyarankan sebaiknya Usaha Kecil sajayang menjadi domain utama sebagai segmen pelayanan KSP/USP. Kalaupun menyentuh usaha menengah, jumlahnya relatif sangat kecil (lihat bagian gambaryang diplot). Dengan mengutip data BPS ~Kementerian Koperasi & UKM (2002), jumlah UK ada sebanyak 40.137.773 unit. Ini berarti jumlah UK yang menjadi segmen pelayanan KSP/USP dapat diproyeksikan kurang lebih 54% atau sebanyak 22.000.000 Unit. Sedangkan UM yang dilayani diproyeksikan 5% atau sekitar 2.800 unit. Ada 3 dasar utama bagi KSP/USP mengapa Usaha Kecil saja yang menjadi domain pelayanan KSP/USP. Pertama, Usaha Kecil tidak begitu membutuhkan modal

kerja maupun investasi yang cukup besar. Menurut amatan penulis suntikan bahwa modal yang dibutuhkan per usaha kecil rata.-rata koperasi sekitar Rp. 10 juta. Dengan modal sebesar itu mereka pada umumnya sudah dapat lebih cepat menggerakkan usahanya. Secara nasional, berarti KSP/USP hanya membutuhkan dana sekitar Rp. 20 triliun rupiah. Cukup kecil bila dibandingkan dengan bantuan pemerintah dalam membayar bunga BLBI sekitar Rp.80 triliun setiap tahunnya. Penulis yakin, pengembaliannyapun akan lebih lancar sepanjang tidak ada biaya-biaya siluman untuk memperolehnya. Kedua, Usaha Kecil lebih dominan menggunakan sumber daya lokal sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap fluktuasi valuta asing. Faktor ini mengakibatkan usaha kecil lebih stabil, sehingga pembayaran cicilan pinjaman pun relatifkan lebih pasti. Ketiga, Usaha Kecil masih memiliki budaya malu bila mereka tidak membayar utangnya.

Sekali lagi, memang diakui bahwa paradigma yang ditawarkan tersebut di atas akan mengalami benturan dengan definisi KSP/USP yang telah terkristalisasi dalam benak masyarakat kita termasuk para pembinaanya. Secara sederhana, koperasi yang menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya serta memberikan pinjaman bagi anggota yang sarna hanya itulah yang disebut KSP.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN KOPERASI ARTHA MANUNGGA SURAKARTA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI KALANGAN USAHA KECIL”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Artha Manunggal dengan nasabah pengusaha kecil
2. Tindakan yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi
3. Cara mengatasi apabila jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat
4. Peran Koperasi Artha Manunggal kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya.
5. Lokasi penelitian adalah di Koperasi Artha Manunggal Surakarta

C. Perumusan Masalah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya koperasi sebagai wadah pusat kegiatan ekonomi harus mampu menata kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan karena merupakan perwujudan pembangunan ekonomi dimana sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan dengan segala potensi ekonominya. Koperasi sebagai penggerak roda perekonomian di daerah pedesaan, melalui usaha-usaha pemberian kredit sebagai tambahan modal dengan mudah dan bunga rendah kepada pedagang sehingga pedagang lebih dapat berkembang. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Artha Manunggal dengan nasabah pengusaha kecil ?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi ?
3. Bagaimana cara mengatasi apabila jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat ?
4. Bagaimana peran Koperasi Artha Manunggal kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Artha Manunggal dengan nasabah pengusaha kecil.
2. Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.
3. Mengkaji cara mengatasi apabila jaminan yang diberikan oleh si debitur kurang memenuhi syarat.
4. Mengkaji peran Koperasi Artha Manunggal kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah penerima kredit dalam membantu kelancaran usahanya.

E. Manfaat Penelitian

Bahwa suatu penelitian sangat besar kegunaannya, sehingga manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tidak hanya teori tetapi juga praktek.
2. Dapat dipakai sebagai perbandingan dari teori dan kenyataan dalam praktek oleh penelitian lainnya yang sedang mempelajari masalah yang berkaitan dengan judul tersebut.
3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sumber pemikiran dan bahan perbandingan untuk dapat mengambil keputusan dalam memberikan kredit kepada pedagang oleh koperasi.

F. Metode Penelitian

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Artha Manunggal dengan nasabah pengusaha kecil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.¹

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di Koperasi Artha Manunggal Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

¹ Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 10.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Artha Manunggal Surakarta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di Koperasi Artha Manunggal Surakarta. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan

permasalahan yang diajukan sehingga kebakuan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.²

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Koperasi Artha Manunggal Surakarta.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan

² Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi, Hal. 207.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁴ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

⁴ Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 17.

⁵ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hal. 37.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Pengaturan Koperasi Indonesia
 - 3. Kelembagaan Koperasi
 - 4. Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi
 - 5. Modal Koperasi
- B. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Subyek dan Obyek Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
 - 4. Asas-asas Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Suatu Perjanjian
- C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian Perjanjian Kredit
 - 2. Pengertian Kredit

3. Unsur-Unsur Kredit
4. Sasaran Kegiatan Perkreditan
5. Tujuan Fungsi Kredit

D. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Kecil

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Dilaksanakan Oleh Koperasi
Artha Manunggal Dengan Nasabah Pengusaha Kecil

C. Tindakan dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila
Debitur Melakukan Wanprestasi

D. Cara Mengatasi Apabila Jaminan Yang Diberikan Oleh Si Debitur
Kurang Memenuhi Syarat

E. Peran Koperasi Artha Manunggal Kepada Para Pengusaha
Golongan Ekonomi Lemah Penerima Kredit Dalam Membantu
Kelancaran Usaha

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran